

T E S I S

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Disusun Oleh:

NAMA	: ROSDIANICA DEWI LESTARI
NOMOR POKOK	: 1863001054
PROGRAM STUDI	: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	: MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.APN)**



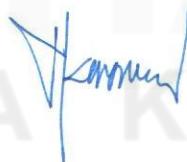
**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA
2020**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rosdianica Dewi Lestari
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863001054
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tugas Akhir/Tesis : Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis



(Dr. R. Luki Karunia MA)

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Rosdianica Dewi Lestari
Nomor Pokok : 1863001054
Program Studi/Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara/ Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Telah mempertahankan Tugas Akhir ini dihadapan Tim Pengaji
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Desember 2020
Pukul : 1863001054

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS :
Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si.
Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.
Anggota : Dr. A. Rina Herawati, M.Si
Pembimbing Tugas
Akhir/Tesis : Dr. R. Luki Karunia MA



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 29 November 2020



Rosdianica Dewi Lestari

KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-NYA akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”** ini. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademis untuk menempuh ujian Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari memiliki keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman sehingga penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mandalam kepada Dr. R. Luki Karunia, MA., selaku dosen pembimbing dan semua pihak lain yang membantu;

1. Ibu Prof. Dr. Nurilah Nurdin Ketua Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Ibu Dr. A. Rina Herawati, M.Si., selaku dosen pembahas;
3. Bapak Dr. Asropi, M.Si., selaku dosen pengaji;
4. Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd., selaku dosen pengaji;
5. Kepada seluruh Dosen dan seluruh staf Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu penulis selama kuliah pada Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara.
6. Teruntuk teman-teman satu kelas MKN 2018, thankyou so much guys telah memberikan pengalaman, saling support selama proses perkuliahan dan pertesian. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.
7. Teruntuk Bapak Rasim, S.Pd, M.Pd dan Mamah Tian Dewi yang telah memberikan doa, dorongan, dan kasih sayang kepada teteh sehingga teteh dapat menyelesaikan kuliah S2 dan tesis ini dengan lancar..hatur nuhun mamah dan bapak, teteh sayang bapak dan mamah.
8. Teruntuk suamiku tercinta, Muhamad Surya. Terima kasih Aa telah dengan sabar mendukung dan memberikan doa serta kasih sayang dalam proses perjalanan pengerjaan tesis ini. Hatur nuhun Aa sayang I Love You so Much.

9. Teruntuk adik tercinta dan tergemoy Vera Dwi Yunia, makasih dedek atas doa dan semangatnya buat teteh.
10. Teruntuk Ibu dan Bapak Mertua, terima kasih atas doa dan dukungannya buat teteh.
11. Teruntuk adik ipar tercinta, Rani, Puji dan Rahmat terima kasih atas doanya buat teteh.
12. Keluarga besar tercinta baik ua, mamang, sepupu-sepupu dan ponakan tersayang yang sudah memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
13. Kepada mba dan mas di McD Shinta, terima kasih banyak meskipun saya hanya pesan paket PaNas namun saya dapat mengerjakan tesis dan menggunakan wifi dari pagi sampai sore disana.
14. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Jakarta, 2 Desember 2020

Penulis



Rosdianica Dewi Lestari

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

ABSTRAK

ROSDIANICA DEWI LESTARI, 1863001054

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

110 halaman, 5 Bab, xii, 12 tabel, 1 gambar dan 20 lampiran

Referensi: 27 buku dan peraturan, 4 artikel, 2 internet dan 10 lainnya (2002-2019)

Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan mempunyai landasan hukum yang mengatur mengenai kewajiban implementasi laporan keuangan berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual mempunyai perbedaan mendasar dengan sistem akuntansi sebelumnya yaitu adanya laporan operasional. Laporan operasional digunakan untuk mengevaluasi pendapatan-LO dan beban yang diperoleh dan digunakan oleh unit/instansi. Implementasi standar akuntansi berbasis akrual masih menemui tantangan hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2015 bahwa pemerintah harus dapat menyajikan seluruh pendapatan, beban, aset dan kewajiban secara lengkap dengan menetapkan kebijakan akuntansi atas transaksi/ kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar akuntansi berbasis akrual yaitu melalui pengakuan, pengukuran dan pengungkapan Pendapatan-LO dan beban Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) pada tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui telaah dokumen keuangan berupa laporan keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2017 dan wawancara dengan key informan. Hasil penelitian berupa analisis yaitu implementasi standar keuangan berbasis akrual dan Dikmas melalui pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan Pendapatan-LO dan Beban yang tersaji pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2017 sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dan peraturan keuangan terkait lainnya. Terdapat kebijakan khusus untuk pengakuan akun beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu diakui sebagai beban apabila per tanggal pelaporan satker telah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak yang menerima. Kebijakan tersebut diatur dalam PP71 Tahun 2010 yang memperbolehkan adanya penundaan pengakuan suatu pos.

Kata kunci: implementasi standar akuntansi berbasis akrual, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, Pendapatan-LO, beban

**APPLIED MASTER PROGRAM
STATE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

ABSTRACT

ROSDIANICA DEWI LESTARI, 1863001054

IMPLEMENTATION OF ACCRUAL BASED ACCOUNTING STANDARDS IN THE DIRECTORATE GENERAL OF EARLY CHILDREN EDUCATION AND COMMUNITY EDUCATION, MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

110 Pages, 5 chapters, xii, 12 tables, 1 picture and 20 attachments

References: 27 books and regulations, 4 articles, 2 internets and 10 others (2002-2019)

Since the issuance of Government Regulation Number 71 Year 2010, the implementation of the Government Accounting System has a legal basis which regulates the obligation to implement accrual-based financial statements. Accrual-based accounting has fundamental differences from the previous accounting system, namely the existence of operational reports. Operational reports are used to evaluate income-OR and expenses obtained and used by units / agencies. The implementation of accrual-based accounting standards still faces challenges, this is stated in the BPK Audit Results Report on LKPP 2015 that the government must be able to present all revenues, expenses, assets and liabilities in full by establishing accounting policies for specific economic transactions / events or events. This study aims to determine the implementation of accrual-based accounting standards, namely through the recognition, measurement and disclosure of the Directorate General of Early Children Education and Community Education (Ditjen PAUD and Dikmas) income-OR and expenses in 2017.

This study used descriptive qualitative research with data collection through review of financial documents in the form of financial reports of the Ditjen PAUD dan Dikmas in 2017 and interviews with key informants. The results of the research are in the form of analysis, namely the implementation of accrual-based financial standards through recognition, measurement, and disclosure of Income-OR and Expenses presented in the Financial Statements of the Ditjen PAUD dan Dikmas in 2017 in accordance with PP 71/2010 and other related financial regulations. There is a special policy for the recognition of an account of goods expenses to be submitted to the public, namely it is recognized as an expense if as of the reporting date the working unit has received an Accountability Report (LPJ) from the receiving party. This policy is regulated in PP71/2010 which allows postponement of recognition of a post.

Keywords: implementation of accrual based accounting standards, recognition, measurement, disclosure, income-OR, expenses

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci	10
1. Teori Implementasi	10
2. Teori <i>New Public Management</i>	12
3. Akuntansi Pemerintahan	14
4. Laporan Keuangan Pemerintah.....	23
5. Kriteria Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan dalam Akuntansi	33
6. Akuntansi Pendapatan.....	34
7. Akuntansi Beban	40
8. Peraturan Perundangan-undangan.....	45
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Konsep Kunci.....	53
D. Model Berfikir	54
E. Pertanyaan Penelitian.....	54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Metode Penelitian	56
B. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Observasi	57
2. Wawancara.....	58
3. Telaah Dokumen.....	59
C. Prosedur Pengolahan Data	60
D. Teknik Analisis Data.....	61
E. Validasi Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	64
1. Gambaran Umum Ditjen PAUD dan Dikmas.....	64
2. Visi dan Misi Ditjen PAUD dan Dikmas.....	70
B. Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian	73
1. Analisis Pengakuan Pendapatan-LO	73
2. Analisis Pengukuran Pendapatan-LO	77
3. Analisis Pengungkapan Pendapatan-LO	80
4. Analisis Pengakuan Beban.....	92
5. Analisis Pengukuran Beban	94
6. Analisis Pengungkapan Beban.....	97
C. Keterbatasan Penelitian	102
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017	5
1.2 Rincian pagu dan realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat tahun 2017.....	6
1.3 Rincian penyampaian LPJ atas Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017.....	7
1.4 Rincian Saldo Jumlah lembaga yang belum menyampaikan LPJ atas Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016.....	7
2.1 Penyajian akun pendapatan pada Laporan Operasional.....	39
2.2 Penyajian Akun Beban pada Laporan Operasional.....	45
2.3 Penelitian Terdahulu.....	47
3.1 Daftar <i>Key Informan</i>	59
4.1 Penyajian Akun Pendapatan_LO pada Laporan Operasional Ditjen PAUD dan Dikmas.....	81
4.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016.....	83
4.3 Penyajian Akun Beban pada Laporan Operasional Ditjen PAUD dan Dikmas.....	99
4.4 Contoh Penyajian Rincian Beban Pegawai pada CaLK per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016.....	101

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Posisi Ditjen PAUD dan Dikmas dalam mewujudkan pencapaian visi misi Kemendikbud..... 70

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Hasil Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Hasil Wawancara
5. Pedoman Telaah Dokumen
6. Hasil Telaah Dokumen
7. Hasil Triangulasi Sumber
8. Hasil Triangulasi Metode
9. Laporan Operasional Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
11. Lampiran I.13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan 12 Laporan Operasional
12. Contoh Bukti SSBP PNBP atas Pendapatan Jasa Giro
13. Contoh Surat Perintah Pengeluaran Barang
14. Contoh Kuitansi SPJ UP
15. Contoh Kontrak/Surat Perjanjian Kerja
16. Contoh SP2D Tahun 2017 pada Satuan Kerja
17. Permohonan Ijin Penelitian
18. Surat Ijin Penelitian Tesis
19. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
20. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara, hal tersebut tertuang dalam paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket perundang-undangan tersebut mengamanatkan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh, sebagaimana tertuang dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Pada tahun 2005, tepat dua tahun setelah UU No 17 Tahun 2003 diundangkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai ketentuan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual yang dinamakan dengan *Cash Toward Accrual* (SAP).

Namun sampai dengan akhir tahun 2008 pemerintah masih belum mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh, maka pada tahun 2010 diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan mempunyai landasan hukum yang mengatur mengenai kewajiban implementasi laporan keuangan berbasis akrual, adapun waktu pelaksanaan tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa “Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.” Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 maka pada tahun 2015 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Berlakunya PP tersebut membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dalam penerapan basis kas menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan.

Beberapa perubahan yang menandai implementasi standar akuntansi berbasis akrual tertuang dalam Lampiran III PP 71 Tahun 2010 halaman 7 yaitu isi pokok SAP berbasis akrual dan perbedaannya dengan SAP berbasis kas menuju akrual sebagai berikut:

1. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diacu dalam Pasal 70 ayat (2), mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada APBN/APBD menggunakan basis akrual. Di lain pihak, praktik penganggaran dan pelaporan pelaksanaannya pada sebagian terbesar negara, termasuk Indonesia, menggunakan basis kas. Untuk itu KSAP menyusun SAP Berbasis Akrual yang mencakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan finansial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual.
2. Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat). Laporan finansial yang berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Mengacu pada poin-poin diatas dapat diketahui bahwa yang membedakan standar akuntansi berbasis akrual dengan standar akuntansi kas menuju akrual adalah pada pencatatan pendapatan-LO dan beban yang disajikan dalam laporan operasional. Adanya laporan operasional dapat membantu pengguna laporan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sesuai PSAP 12 Par 6 yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional merupakan ciri penting dalam standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencerminkan pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, proses akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan-LO dan beban merupakan tahapan-tahapan penting yang harus dipenuhi sehingga menghasilkan informasi yang dapat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Apabila dari proses pengakuan dan pengukuran Pendapatan-LO dan beban tidak sesuai maka akan berpengaruh terhadap penyajian dan pengungkapan informasi laporan keuangan khususnya laporan operasional yang tidak sesuai (*Garbage In Garbage Out*).

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) merupakan salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola dana APBN sehingga mempunyai kewajiban dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Ditjen PAUD dan Dikmas sebagai unit akuntansi yang wajib menyajikan laporan keuangan bertanggung jawab terhadap informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan. Adapun anggaran yang dikelola oleh Ditjen PAUD dan Dikmas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	218,643,111,000	181,500,092,037	83.01
2	Belanja Barang	1,394,595,921,000	1,342,705,798,707	96.28
3	Belanja Modal	85,045,272,000	79,757,362,771	93.78
4	Belanja Sosial	940,000,000	840,000,000	89.36
	Total	1,699,224,304,000	1,604,803,253,515	94.44

Sumber: Penyusun Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas (Data Diolah)

Dari alokasi anggaran diatas diketahui bahwa anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (belanja barang) memiliki alokasi anggaran tertinggi pada Ditjen PAUD dan Dikmas. Adapun rincian belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2017

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Percentase
1	Direktorat Pembinaan PAUD	72,250,001,000	72,067,000,000	99.75
2	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga	111,951,823,000	107,500,779,597	96.02
3	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	399,533,000,000	399,533,000,000	100.00
4	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	232,078,000,000	232,076,950,000	100.00
Total		815,812,824,000	811,177,729,597	99.43

Sumber: Penyusun Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas (Data Diolah)

Jika dilihat pada tabel diatas maka realisasi untuk belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat terealisasi sebesar 99,43 persen, jika dilihat secara aplikasi penyusunan laporan keuangan maka nilai tersebut akan langsung dianggap sebagai beban sebesar nilai yang sudah terealisasi. Namun apakah hal tersebut sudah dianggap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, jika ternyata anggaran yang sudah terealisasi hampir 100 persen ternyata masih terdapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari lembaga penerima yang belum disampaikan kepada Ditjen PAUD dan Dikmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rincian penyampaian LPJ atas Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017

No	Uraian	Lembaga yang sudah menyampaikan LPJ	Rupiah	Lembaga yang belum menyampaikan LPJ	Rupiah
1	Direktorat Pembinaan PAUD	2743	60,194,855,000	610	11,872,145,000
2	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga	1774140	100,105,757,481	388	7,395,022,116
3	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	7424	264,519,770,000	1,252	135,013,230,000
4	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	92868	179,491,500,000	44,640	52,585,450,000
Total		1,877,175	604,311,882,481	46,890	206,865,847,116

Sumber: Penyusun Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas (Data Diolah)

Dari data diatas Ditjen PAUD dan Dikmas diketahui masih terdapat lembaga penerima bantuan yang belum menyampaikan LPJ, namun tidak hanya itu Ditjen PAUD dan Dikmas juga memiliki saldo atas Beban barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Rincian Saldo Jumlah lembaga yang belum menyampaikan LPJ atas Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016

No	Uraian	Saldo Lembaga yang belum menyampaikan LPJ	Rupiah
1	Direktorat Pembinaan PAUD	70	4,335,000,000
2	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga	0	-
3	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	258	10,187,500,000
4	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	85	3,793,200,000
Total		413	18,315,700,000

Sumber: Penyusun Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas (Data Diolah)

Berdasarkan data diatas, maka masih terdapat saldo LPJ yang belum dipertanggungjawabkan atas penyaluran beban barang untuk diserahkan kepada

Masyarakat. Maka dari itu, melihat dari permasalahan diatas bahwa proses pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akun-akun dalam laporan operasional memiliki tahapan yang sangat penting sehingga tidak hanya dilihat dari proses pencatatan akuntansinya saja yang dijalankan namun saling berkaitan juga dengan aspek pengendalian atas pengelolaan APBN yang nantinya diharapkan akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfokus pada pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan-LO dan beban.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggali data dan informasi terkait Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharap dapat memberikan gambaran perihal implementasi standar akuntansi berbasis akrual di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun instansi lain untuk melakukan evaluasi dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan penentuan langkah strategis agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilakukan lebih baik kedepannya.

2. Bagi dunia akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang implementasi standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah dan dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dipemerintahan.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna layanan publik, dapat mengetahui aktivitas operasi keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran untuk memenuhi kebutuhan layanan publik kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pengakuan pendapatan-LO pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pengukuran pendapatan-LO pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Pengungkapan pendapatan-LO pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan; dan penjelasan hal-hal penting yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pengakuan beban pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 dan 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu mengakui beban pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Kebijakan khusus antara BPK, Kemenkeu dan Kemendikbud terkait pengakuan Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu diakui sebagai beban apabila pertanggal pelaporan satker telah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak yang menerima bantuan. Kebijakan tersebut diatur dalam PP71 Tahun 2010 yang memperbolehkan adanya penundaan pengakuan suatu pos
5. Pengukuran beban pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK No.

224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu beban diukur secara wajar dan sebesar resume tagihan/pembayaran, beban persediaan diukur sebesar pemakaian persediaan dan beban penyusutan dan amortisasi diukur dengan menggunakan metode garis lurus.

6. Pengungkapan beban pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu adanya perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu, rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi dan penjelasan hal-hal penting yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan agar kebijakan atas pengakuan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda diatur ketentuan secara terinci sehingga diharapkan pengakuan beban tersebut dapat menjadi kendali pengelolaan APBN yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Kepada peneliti selanjutnya, penulis diharapkan adanya penelitian lain yaitu evaluasi terkait Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tidak hanya dari akun pendapatan dan beban namun pada akun-akun lainnya seperti persediaan, aset tetap, kewajiban dan lain-lain.



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arikunto,S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Erlina, Dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba Empat
- Hamidi. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Pendekatan Praktis: Penulisan Laporan dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012.Teoru, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Nurdin, Ismail dan Hartati.2019.Metodologi Penelitian Sosial.Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia
- Moleong, Lexy J.2017.Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Noordiawan, Dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:Salemba Empat
- Rusmana, Dkk. 2017. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Suaib, Muhammad R.2016.Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis
- Sugandi, Yogi S. 2011. Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia.Yogyakarta.
- Sudaryono. 2018. Metodologi Penelitian. Depok:PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. AIPI

Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Bandung:Penerbit Alfabeta

Wahab, Solichin A. 2008. Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Artikel:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2016. Treasury Indonesia: Akuntansi Berbasis Akrual Kunci Laporan keuangan Optimal (Edisi Kedua). Jakarta: Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2017. Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat (Edisi 21). Jakarta: Kementerian Keuangan RI

International Federation of Accountant. 2003. *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)*. New York: Edisi 14

Damayanti, Ratna A. 2013. Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual: Konsep, Pemikiran dan Implementasi di Indonesia. *State Accountability Revitalitation* BPKP, 1-17

Sumber Lainnya:

Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. 2017. Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP di Lingkungan Kemendikbud. Jakarta: Kemendikbud RI

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 2017. Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016. Jakarta: Kemendikbud RI

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 2018. Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017. Jakarta: Kemendikbud RI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/ PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Beban secara Akrual pada Laporan Keuangan

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Sumber Internet:

- Herwiyanti, Dkk. 2017. *Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan*. Online. (<http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/20022>). Diakses 7 April 2019)
- Widiastuti, Indah.2016. Penerapan *New Public Management* (NPM). Online. (<https://adoc.pub/penerapan-new-public-management-npm.html>).Diakses 10 Desember 2020

Jurnal Internasional:

- Agburuga, Uche T. 2018. "Economic Performance and Accrual Accounting Reform: OECD Versus Non-OECD Countries". *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*. Vol.6, No.4, pp.85-101
- Efendi, R., Dewi., F. G., & Gamayuni, R. R. 2018. Usefulness Analysis Of Accrual Based Accounting Information On Local Government Financial Statement: A Qualitative Study. *International Journal of Scientific & Technology Research*. Vol 7, Issue 11.
- Elmezughgi, Abdalla., Wakil, Amal Abdel.2018. Feasibility of Transformation to Accrual Basis of Accounting in the Public Sector: Kingdom of Bahrain Context. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Vol 22, Issue 6.
- Puspita, W., Ludigdo, U., & Djamburi, A. 2017. Institutionalization of Accrual Accounting In The Local Government of Malang. *The International Journal of Accounting and Business Society*. Vol. 25, No. 2/ December 2017
- Suparman, S., Siti-Nabiha, A.K. & Phua, LK. 2015. Public sector accounting reforms: assessing Indonesia's readiness towards implementing accrual accounting. *Problems and Perspectives in Management*, Volume 13, Issue 2, 2015
- Yuliati, R., Yuliansyah, Y., & Adelina, Y. E. 2019. "The implementation of accrual basis accounting by Indonesia's local governments". *International Review of Public Administration*, 24(2), 67-80.
- Yusof, Nur Shawalliza., Jaafar, Hartini. 2018. The Implementation of Accrual-Based Accounting in Malaysian Public Sector: Opportunities and Challenges. *International Business Education Journal*. Vol. 11 No. 1 (2018) 49-62.